



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN KEPALA BADAN RISET INFORMASI NASIONAL (BRIN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : ....  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 30 Januari 2023  
Waktu : Pukul 15.21 WIB s.d. 16.37 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI,  
Gedung Nusantara 1, Jakarta  
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII  
DPR RI).  
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Pembahasan relokasi anggaran BRIN TA 2023  
terkait program yang berkaitan langsung untuk  
masyarakat  
2. Lain-lain.  
Hadir : 29 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota  
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI.
2. Dony Maryadi Oekon/F-PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
4. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Naszirul Falah Amru, S.E.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M
4. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
5. Bambang DH.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

6 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin.
4. Ir. Lamhot Sinaga.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.
6. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

2 orang anggota dari 6 anggota:

1. Ramson Siagian
2. Katherine A. Oendoen.

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rico Sia.
4. H. Rudi Hartono Bangun, MAP.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rusda Mahmud.
2. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
2. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M. Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E.,M.Si.
3. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

## **B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Laksana Tri Handoko (Kepala BRIN)
2. Nur Tri Aries. S (Sestama BRIN)

### **JALANNYA RAPAT:**

#### **KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Pertama mohon maaf sedikit agak mundur acara rapat dimulai karena juga kita secara intens membicarakan banyak hal, menyangkut tentang tata kelola, menyangkut tentang target-target program dan sebagainya tadi sebagaimana juga kita lakukan.

Baiklah, mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yakni Senin tanggal 30 Januari 2023.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera kami sampaikan,  
Ohm swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan.*

Pertama-tama pasti marilah kita bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat*, sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugas kita masing-masing sesuai dengan konstitusi yang kita pegang bersama.

Bapak-Ibu sekalian.

Kali ini hari ini kita akan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BRIN menyangkut beberapa hal sebagaimana diagendakan tadi. *Nah* sebelum rapat ini dimulai saya akan memperkenalkan dulu ada anggota baru yang terhormat ini Saudara Rudi Hartono Bangun dari Partai Nasdem, sekarang masuk di Komisi VII dikarenakan yang selama ini Saudara Rudi Hartono Bangun ada di Komisi VI, posisinya digantikan oleh sesama Anggota Fraksi Nasdem yakni digantikan Saudara Yuristyo Firma Data, S.E.,M.M.

Sehingga Saudara Rudi Hartono Bangun, S.E., M.AP. sekarang menjadi Anggota Komisi VII, ini Kakak, ya mungkin berdiri Kakak Rudi Bangun,

#### **F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):**

Ketua, Pimpinan.



**KETUA RAPAT:**

Sudah dengar kan suaranya, suaranya agak keras nampaknya, dari Sumut begitu, memang keras-keras Sumut itu ya, hatinya bagus.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

**F-PAN (FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.):**

Interupsi Pimpinan, masih ada satu dari Sulawesi Tenggara.

**KETUA RAPAT:**

Aduh saya lupa.

**F-PAN (FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan, perkenalkan.

Pimpinan Komisi VII yang saya hormati.

Rekan-rekan senior-senior Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Perkenalkan saya Fahri Pahlevi Konggoasa dari Fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Sulawesi Tenggara dari Komisi IV.

**KETUA RAPAT:**

Pindahan dari Komisi IV.

**F-PAN (FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi hari ini kita bersyukur Komisi VII mendapat penguatan ada dua anggota baru yang kita harapkan semakin dinamis dan semakin mendekati titik-titik ideal.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Hari ini kita sebetulnya mau membahas tentang realokasi atau ya realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023, terkait rencana kerja program-program berkaitan langsung dengan masyarakat.

Bapak-Ibu sekalian.



Dalam catatan kami telah hadir, maaf 23 dari 52 Anggota Komisi VII dan 8 dari 9 fraksi yang ada, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang ada telah dinyatakan kuorum.

Sebagaimana dalam ketentuan bahwa rapat biasanya dinyatakan terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu saya minta persetujuan anggota bahwa rapat ini dilakukan secara terbuka, setuju Bapak-Ibu sekalian? Setuju.

Ya terbuka? Memang terbuka.

Dengan persetujuan anggota, dengan demikian dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT:SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**  
**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.21 WIB)**

Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kita akan berjalan kurang lebih 2 jam rapat ini, maka dari itu saya minta persetujuan forum bahwa rapat ini akan ditutup kurang lebih nanti pukul 17 lewat 15 menit, begitu Bapak-Ibu sekalian, setuju?

**(RAPAT:SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, Bapak-Ibu yang kami hormati.

Sebagai tindak lanjut keputusan RDP tanggal 18 Januari 2023 yang lalu, agenda pada rapat hari ini adalah pembahasan realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023. Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan terkait rencana program yang terkait langsung dengan masyarakat dengan anggaran tahun atau BRIN tahun anggaran 2023 ini.

Selanjutnya untuk efektifnya waktu kami persilahkan untuk disampaikan pemaparan oleh Kepala BRIN.

Dipersilahkan.

**F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebentar izin interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-GOLKAR (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**



Terima kasih banyak Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera.

Saya sebelumnya ingin sebelum ada pemaparan dari BRIN, saya harus memberikan interupsi dan penyampaian terlebih dahulu dalam hal untuk merespon situasi kekinian dan bahkan mungkin 1 tahun terakhir lah terkait mengenai wajah riset lembaga riset kita di negara kita ini, yaitu BRIN.

Yang pertama, saya merespon yang paling aktual dulu *nih* terkait mengenai ada pemberitaan di Tempo, ada pemberitaan di Tempo *nih* ini ngeri sekali. Ini apa data *tagline*-nya apa *nih*, *pat gulipat* dana riset diseminasi konstituen. Ingin saya luruskan terlebih dahulu, apa yang diberitakan oleh Tempo itu, itu faktanya sangat sekali berbeda dengan kondisi riil yang ada karena hanya merujuk dari satu kejadian saja, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara.

Lalu digeneralisir seakan-akan bahwa kami Komisi VII ini menerima, bahkan mungkin segala macam memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi-pribadi kami.

Saya tegas nyatakan 100% ini fitnah dan melalui forum yang terhormat ini dan semoga ini didengar Pak oleh seluruh masyarakat di Indonesia, terlebih khusus adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, terkhusus adalah Bareskrim Mabes Polri, terkhusus adalah Kejaksaan Agung kita dan terkhusus Badan Pemeriksa Keuangan kita, segera usut ini praktek penggunaan dan pemanfaatan anggaran di BRIN ini.

Kenapa saya bilang seperti itu? Faktanya yang perlu dipahami bahwa bagi kami semua Anggota DPR tentunya kami memiliki kewajiban untuk membawa dan memperhatikan aspirasi di dapil kami masing-masing, dalam hal ini konstituen.

Saya pikir itu melekat dalam badan kami masing-masing, ya tentunya lah yang namanya kita anggota dan kita punya dapil perlu ada kemanfaatan terhadap dapil kami masing-masing. Dan ingin saya sampaikan kepada forum yang terhormat ini ada sebuah fakta, ini di *Zoom nih* pada kamera nih, mohon di *Zoom*, digede *nih* kalau perlu.

Anggaran 2022 itu yang diperuntukkan untuk beberapa program-program masyarakat, saya bilang program masyarakat ya, di luar program-program yang ada di BRIN itu kurang lebih 800 miliar per tahun yang sudah direncanakan. Namun berdasarkan evaluasi yang terealisasi hanya 100 miliar, silakan saja dicek.

Pertanyaan paling sederhana bagi saya adalah ke mana 700 miliar nya itu? Kalau tadi kita mengutip dari pemberitaan majalah Tempo yang seakan-



akan itu digunakan semuanya oleh kita, faktanya tidak, itu fitnah. Seakan-akan ada penggiringan opini bahwa kami-kami Institusi DPR ini melakukan *pembancahan* anggaran riset negara kita.

Saya tegaskan sekali lagi faktanya tahun 2022 anggaran yang terealisasi untuk masyarakat dalam rangka mensosialisasikan keberadaan Institusi BRIN dan menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat di bawah yang nanti akan dikorelasikan dan disinkronisasikan dengan program riset negara kita yang terealisasi hanya 100 miliar di tahun 2022. Itu dulu ya supaya ini lurus *gitu loh*.

*Nah* oleh karena itu justru kami malah menduga ada oknum-oknum tertentu, baik itu di internal BRIN ataupun di luar internal BRIN yang mau mencoba menggeser substansi permasalahan yang ada di Institusi BRIN kita hari ini, justru kita menduganya seperti itu dengan membangun opini yang seakan-akan dikambinghitamkannya Komisi VII DPR RI.

Justru kami menilai ada praktek oknum-oknum yang mau mencoba menggeser opini, perlu kita pahami selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun terakhir ini pasca terbentuknya BRIN, banyak sekali permasalahan, baik itu permasalahan di internal BRIN-nya, hubungan antar sesama periset dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit juga diduga banyak sekali tindakan-tindakan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh beberapa pejabat-pejabat terkait yang ada di BRIN.

Dalam hal ini saya menegaskan pertanggungjawab penuh Kepala BRIN terhadap situasi ini, dari awal memang kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran yang didorong oleh BRIN secara institusi terhadap riset negara kita itu masih sangat minim sekali, karena apa? Dari kurang lebih hampir 7 triliun ya, 6 koma berapa ya anggaran total BRIN? Berapa? 6,4 triliun lah kita anggap ya. Kita anggap 6,38 triliun, 4 triliunnya itu *full* dipakai untuk operasional kepegawaian, belanja kepegawaian, 4 triliun *loh*, 4 triliun itu untuk belanja pegawai itu. Ingat ya dari 6,3 triliun, 4 triliun dipakai untuk belanja pegawai.

Berarti anggaran yang dialokasikan untuk menyerap kondisi masyarakat di bawah dan terkait riset hanya kurang lebih 2 triliun, yang didalamnya ada 800 miliar yang memang anggaran kita. Yang ternyata realisasinya hanya 100 miliar, kemana itu semua? *Nah* ini makanya kita harus buka-bukaan.

Makanya saya minta dalam forum yang terhormat ini supaya terang-benderang, jangan sampai ada dusta diantara kita. Ini seakan-akan kita yang ini, jadi saya minta kepada forum ini nanti merekomendasikan untuk aparaturnya terkait, BPK untuk segera melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik terhadap penggunaan anggaran BRIN ini. Dan itu masuk ke dalam kesimpulan.

Dan yang kedua, saya tegas *nih* merekomendasikan pergantian Kepala BRIN. Nanti silakan aja itu domain masing-masing teman-teman anggota, tapi ini pandangan saya sebagai Anggota Komisi VII yang juga Pimpinan Komisi

VII. Saya merekomendasikan pergantian Kepala BRIN karena ini sudah hampir 2 tahun selalu bermasalah kayak begini.

Saya pikir itu saja Pimpinan, untuk memoderasi semuanya.  
Silakan Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya. Terima kasih Saudara Maman Abdurrahman selaku Anggota Komisi VII sekaligus sebagai Pimpinan Golkar.

Apakah ini mewakili suara Golkar, mana? Ibu Roro

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

itu kayaknya mewakili suara PKS *deh gitu*.

**KETUA RAPAT:**

Jadi *clear* ya bahwa ini tidak, atas nama oknum *gitu* Pak Maman.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Kita di sini rapat Komisi, jadi komisi aja yang memutuskan. Ini kan bukan membahas undang-undang, *nggak* usah perfraksi, langsung aja keputusan komisi semuanya. Misalnya usulan dari anggota yang setuju yang juga pimpinan, bahwa audit investigasi ya kita putus aja audit investigasi yang seperti itu aja Pak Ketua. Jadi *nggak* usah fetakompli seperti itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya, terima kasih atas masukannya Pak Ramson.

Iya ada yang di *Zoom*, Pak Gandung silakan.

**F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):**

Pimpinan, iya siap. Terima kasih Pimpinan.



Saya usul karena melihat suasana yang saya tangkap telinga dan mata sendiri, Pak Kepala BRIN itu bilang, biasa saya dimarahi DPR, itu biarkan saja, *nah* ini tidak pantas di luar batas kepatutan Kepala BRIN seperti ini. Banyak hal-hal yang menyalahi dan tendensius untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Untuk itu saya minta Kepala BRIN kita ganti saja dan saya usul ada audit investigasi tentang perjalanan keuangan BRIN, banyak yang dikorupsi itu. Saya yakin semakin-yakinnya, maka dari itu saya minta Kepala BRIN itu jangan, jangan, jangan memberikan meninabobokan Anggota DPR, Komisi VII terutama.

Ini, ini saya melihat lama-lama muak saya dengan Kepala BRIN ini, sudah memperporak-porandakan lembaga, dengan mitra dia ngibuli terus. Ini penting, saya setuju sekali kita panggil BPK untuk bisa mengadakan audit investigasi.

Dengan maksud-maksud tertentu, saya yakini saya Gandung Pardiman atas nama Anggota Komisi VII maupun fraksi, usul agar supaya BRIN di audit investigasi. Kita lapor KPK, banyak penyelewengan yang kasat mata, maupun yang tidak kasat mata. Ini penting dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini apa, apa mendapat restu dari Ketua Kapoksi saya.

Jadi saya usul dan pelecehan kepada Komisi VII sudah terasa kita Pak, mengapa kita diam saja padahal banyak hal yang perjalanan keorganisasian, keuangan di BRIN itu sangat, sangat tidak sesuai dengan aturan **...(suara tidak jelas 18.39)...**

**KETUA RAPAT:**

Iya terima kasih.

Sebentar, sudah cukup Pak Gandung ya substansinya sudah di tangkap.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Begini Pak Ketua, sesuai fungsi kita.

**KETUA RAPAT:**

Iya sebentar, sebentar, nanti abis ini.

Ya sudah cukup Pak Gandung ya? Substansinya sudah kita dapat.

Sekali lagi terima kasih.

**F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):**

Apa, mau, mau ditanggapi, mau ditanggapi apa ini saya, coba saya mau dengar tanggapan.



**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak Gandung. Ya terima kasih.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua, sesuai fungsi kita, sesuai konstitusi, kita yang tepat merekomendasikan agar dilakukan audit investigasi atau audit khusus terhadap anggaran yang 800 miliar yang relasinya hanya 100 miliar ke BPK. Nanti dari situlah berkembang, jadi kita melaksanakan sesuai fungsi kita aja itu amanat konstitusi, itu aja kita jalankan karena memang anggaran yang masyarakat bertanya, BRIN menjawab yang di daerah-daerah tersebut kalau saya lihat di sini anggarannya 300 juta, tapi itu kalau amplopnya rakyat yang hadir 200 orang kan kali 50.000 hanya 30 juta, kalau konsumsinya rata-rata paling tinggi 100.000 per orang kali 200 orang hanya 20 juta, itu 50 juta, yang lain-lain bagaimana karena anggarannya 300 juta.

Jadi itu perlu dilakukan audit khusus atau audit investigasi, sesudah itu nanti baru rekomendasi soal pertanggungjawaban dari Ketua BRIN diganti, bagaimana selanjutnya *gitu*. Itu usul saya Pak Ketua, kalau itu bisa kita putuskan sekarang. Komisi VII memutuskan langsung kita minta BPK melakukan audit investigasi secepatnya.

Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Iya, satu-satu yang mana. Ini dulu.

Pak Mul dulu, silakan.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Tadi sebetulnya suara partai oposisi sudah tercermin dari apa Bapak Maman, ini adalah anggota yang terganteng di komisi kita, puji dulu ini. Terus terang saja Pimpinan, sejak pembentukan BRIN ini kami merasakan karena saya dulu adalah sekjen ... (suara tidak jelas 21.09) ... teman-teman saya juga banyak di sini yang menjadi deputi ya.

Saya ngobrol dengan deputi ini, ... (suara tidak jelas 21.17) ... dari hati ke hati suasana transisional sampai hari belum selesai, baik dari aspek SDM, baik aspek keorganisasian, kelembagaan, penganggaran. Jadi saya melihat *capacity* untuk pengimplementasian program sangat lemah, tidak implementatif, sehingga kasus-kasus ini muncul.

Ketika baru ada wacana tentang badai besar di Banten, muncul *statement* seorang peneliti BRIN akan terjadi badai ekstrem di Banten, apa kewenangannya? . Walaupun saya tahu Ristek BRIN melakukan *study early*

*warning* dengan bantuan Jerman, data-data itu kuat kita, tapi yang berhak menyampaikan itu ke publik adalah BMKG.

Sekarang kita dikejutkan lagi seorang periset memberikan segepok data, sebundel data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu? Jadi tidak heran kalau BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur tahun 2022 di BRIN.

Kita tidak heran Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM di BRIN, banyak sekali permasalahan di BRIN ini. Jadi cita-cita kita ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan lembaga riset ternyata yang muncul adalah konsolidasi kelembagaan *tok*, didalamnya konsolidasi anggaran, konsolidasi program tidak jalan.

Anggaran BRIN yang kita halalkan menjadi sekitar 24 triliun adanya kurang lebih 6 sampai 7 triliun, padahal semua lembaga sudah melebur. Saya masih ingat ketika Bapak Profesor Nasir hadir di Panja BRIN, menyatakan beliau "Ini pembentukan BRIN membubarkan data ... (suara tidak jelas 23.44)... *tuh nggak* betul, salah itu, harusnya tidak dengan Perpes kalau, maupun dengan Perpu" karena dua lembaga itu kan dasarnya undang-undang, dibubarkan hanya dengan Perpres.

Jadi Pimpinan, saya menganggap Pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak bisa mengkonsolidasikan BRIN, karenanya saya mengusulkan sepakat dengan Bapak Wakil Ketua Pimpinan yang sangat ganteng ini, saya setuju. Saya juga mengusulkan agar diganti saja pimpinan yang ada sekarang.

Demikian.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

Izin Ketua

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan Pak.

#### **F. GOLKAR (LAMHOT SINAGA)**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Pak Mul kalau ganteng itu sebenarnya Pak Handoko dengan Pak Maman ganteng juga, cuma bedanya kalau Pak Maman ini nuraninya untuk urusan rakyat sensitifitasnya sangat tinggi, itu aja bedanya.

Baik, tadi sudah diawali, pertama begini saya ingin mengangkat dulu tadi sudah dimulai oleh Pak Maman, dari 6,3 triliun anggaran BRIN, ada 7 program, yang program tersebut adalah langsung terhadap masyarakat. *Nah* dalam



konteks kita sebagai Komisi VII melakukan pengawasan hari ini kita melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran 2022.

Khusus untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat dari 808 miliar yang bisa terealisasi hanya 74,5 atau tadi Pak Maman membulatkan menjadi 100 miliar. Apa itu? Satu, bantuan riset talenta inovasi yang seharusnya ya 165 miliar, nol. Perusahaan pemula berbasis riset yang seharusnya 26 miliar, nol. Fasilitasi usaha mikro berbasis lptek 16 miliar, *grass root* inovasi berapa ini? 16 miliar. Masyarakat bertanya BRIN menjawab 300 miliar karena per satu kegiatan katanya 300 juta ya, produk inovasi 150 miliar, riset Indonesia maju 110 miliar, totalnya 800,8 miliar.

Dari 7 program ini yang terealisasi adalah hanya 74,5 dan ini semua program adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pertanyaan, apakah BRIN yang katanya Pak Mul tadi sedang transisi sekarang ini tidak mempunyai hati nurani, *kok* anggarannya ada 800 miliar tapi yang bisa terealisasi hanya 74,5 miliar? Apakah mungkin seorang Kepala BRIN yang dengan sengaja bahwa program ini hanya 74,5 miliar, tidak punya kepedulian terhadap masyarakat.

Sesungguhnya kan ini yang didorong oleh teman-teman di Komisi VII, bagaimana optimalisasi program yang dilakukan oleh BRIN bisa dirasakan oleh masyarakat, faktanya tidak. *Nah*, oleh karena itulah makanya Pak Maman tadi mengusulkan itu sangat punya landasan kuat, ya tidak ujug-ujug, mohon maaf kepada teman-teman dari Fraksi PDIP.

Bahwa pengusulan penggantian Kepala BRIN ini maaf, mohon maaf Pak Handoko kita melihat dari postur ini. Anda diberikan kekuasaan untuk mengelola anggaran yang diberikan kepada masyarakat 800 miliar, tapi yang bisa terealisasi adalah hanya 74,5.

Bahkan ada upaya untuk penggiringan opini bahwa anggaran yang ada di BRIN itu adalah digunakan semena-mena oleh Anggota DPR RI. Lah yang terealisasi cuma sedikit *kok nggak* sampai 10%, gimana BRIN, *nggak* bisa. Pak Handoko *nggak* bisa melanjutkan sebagai Kepala BRIN, kalau diberikan kesempatan lagi Pak Handoko ini melanjutkan maka rakyat akan sengsara tidak mendapat apa-apa dari BRIN, tidak mendapat apa-apa dari hasil-hasil riset kita.

Itulah faktanya maka kita mendorong, alasan kita sangat kuat, kita tidak mau BRIN di 2023 tidak menghasilkan sebuah riset inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. *Nah*, oleh karena itu Pimpinan, saya kira tidak, rapat kali ini kalau Pak Ramson tadi mengusulkan audit investigasi dan lain sebagainya, kita juga masih mengingat tahun lalu BRIN ini kan bukan WTP.

Dari seluruh mitra Komisi VII hanya BRIN lah yang tidak WTP, benar *nggak* teman-teman? Pak Handoko tahu kan bahwa seluruh mitra Komisi VII hanya BRIN yang tidak WTP. Artinya Pak, pengelolaan anggaran Bapak itu kacau balau, tidak semestinya, dampaknya apa? Masyarakat, rakyat kecil dan



ada pemelintiran opini bahwa seolah-olah kami Komisi VII, ini bahaya ini Pak kalau dilanjutkan, bahaya sekali.

Ini supaya teman-teman pers, khususnya Tempo bisa mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di BRIN ini. Apakah semua pemberitaan yang di Tempo itu bahwa seolah-olah Komisi VII yang memanfaatkan hasil anggaran-anggaran di BRIN, supaya mereka tahu, republik ini tahu, masyarakat tahu.

Ini penting, untung tadi Pak Maman membuka itu, *nah* karena sudah dibuka saya kira ini juga yang satu lembar ini tolong *deh* dibagikan kepada teman-teman pers *gitu loh*. Inilah bukti bahwa BRIN ini tidak punya kepedulian terhadap masyarakat kecil di bawah, masa anggaran yang teralisasi hanya 74 miliar, *nggak* nyampe 10%, kacau ini kepala badan seperti ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Iya, kok marahnya ke sini anda, *nggak* kan, kok nuding-nuding saya gitu loh.

Oke, dipersilakan.

**F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Anggota,  
Yang saya hormati Pak Kepala BRIN, Deputy dan jajaran.

Pak Kepala, saya memang baru hari ini masuk *gitu* jadi saya memperkenalkan diri nama saya Rudi Hartono Bangun. Tapi tadi sekilas saya melihat Pak Ketua, Pak BRIN ini mukanya santai dan tenang, kalau seakan-akan *nggak* peduli mau diganti *nggak* diganti bukan urusan kalian, itu tangkapan saya gitu. Tapi begitupun ini saya mau menyatakan pendapat, yang pertama begini Pak Laksamana Handoko ya Pak ya, namanya Pak, Laksana.

Saya mau bertanya sebagai wakil, sebagai rakyat Pak, sekarang ini wakil rakyat, kalau di luar saya rakyat.

Pertama tentang pagu anggaran, saya ini baca di halaman 2, total pagu BRIN ini 6,3 triliun ya Pak Handoko ya. Terdiri dari urusan operasional 4 triliun, PNBPN 199M, BLU 143M dan *loan*, *loan* artinya pinjaman ya Pak ya. Bapak pinjam sama siapa atau meminjamkan, bisa interaktif Pimpinan ya, 435 ini Bapak pinjamkan ke orang *gitu* kan.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**



Mohon izin Bapak Pimpinan.

Pinjaman, hibah luar negeri.

**F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP):**

Ada SBSN lagi, surat berharga ini ya Pak ya 240 miliar dan teknisnya 1,3 triliun. Ini kan jumlah fantastis Pak, jika dinilai dari anggarannya ini yang kebanyakan untuk riset Pak, penelitian dalam bentuk *paper* ya, kan penelitian Pak. Peneliti *nggak* ada fisiknya, bukan seperti di Kementan ada beli traktor, misalnya di PUPR ada fisik jalannya. Ini sebagai pembandingan ya Pak, saya udah keliling di beberapa Komisi XI, VI, VIII entah berapa lupa saya.

Ini di BUMN aja Pak sekelas Kementerian BUMN itu cuman 300 miliar Pak, kementerian yang punya anggaran. Bapak 6 triliun Pak, bukan sedikit Pak, uangnya kalau di cecer ini lewat Pondok Indah sana Pak. Kalau dicecerkan jadi uang 50.000 sampai ke Pondok Indah uang 6 triliun ini, itu yang pertama Pak.

Yang kedua begini, saya mau tanya tentang program dukungan manajemen yang 4,1 triliun. Ini mohon Bapak jelaskan secara detail Pak 4,1 triliun untuk kegiatan seperti apa? Kalau untuk penelitian itu banyak Pak. Kalau untuk proyek jalan jembatan mungkin jelas hitungannya berapa kilometer jalannya, misalnya 100 kilo menghasilkan uang 4 triliun, jelas Pak fisik jalannya. Kalau riset dalam bentuk *paper* 4 triliun ini gimana bentuknya Pak, saya ini lihat ini bukan proyek Pak, bisa-bisa saya duga ya, ini duga tipu-tipuan aja ini Pak *gitu*.

Saya minta penjelasannya secara detail dari Bapak tertulis, sehingga saya bisa membagikannya ke rekan-rekan media dan konstituen saya Pak yang melihat kegiatan rapat saya ini *gitu* dan saya bisa mempublikasikannya ke rakyat Indonesia yang milih saya *gitu*, untuk apa saja ini yang sekian triliun, 4 triliun.

Kemudian ketiga Pak, ada program riset dan inovasi IPTEK ilmu pengetahuan dan teknologi 2,2 triliun Bapak buat. Ini menginovasi bangsa Indonesia 2,2 triliun, seperti apa contohnya Pak dan yang menghasilkan lptek ini ilmu pengetahuan teknologi baru ya berarti ya seperti apa yang 2,2 t ini Bapak buat IPTEKnya. Ini kan uang rakyat Pak, jadi Bapak Kepala Deputi jajaran harus paham ini, kita pakai uang pajak rakyat *loh* ini Pak.

Pajak dalam, dari asalnya Bapak saya jelaskan sedikit ya, dari PPN, dari PPH, PNBP, pajak barang mewah, itu dikumpulkan bendahara negara, kemudian dibagi-bagi ke lembaga dan menteri seperti Bapak *gitu*. Ini uang kita semua Pak, jadi kalau Bapak *nggak* paham menggunakannya ya memang kata Pak Pimpinan Pak Maman, kawan-kawan, Bapak harusnya mundur teratur atau diganti *gitu*, itu Pak yang ketiga.

Kemudian ada yang keempat di halaman 8 Bapak, Bapak baca sendiri itu. Ada alokasi distribusi dan durasi kegiatan untuk pimpinan dan anggota dengan 25 kegiatan sampai Agustus, bulan Agustus depan. Yang saya mau nanya *gini* Pak, ini kegiatan apa Pak Bapak buat ini, apakah sudah tepat

nomenklaturnya, apakah tidak tumpang tindih dengan anggaran kegiatan yang ada di Komisi VII, sekretariat dan tidak layak ini Bapak paparkan dalam bentuk paper di Raker kita loh Pak.

Setahu saya ya Pak Kepala BRIN ya saat ini kegiatan anggota itu sudah dilaksanakan oleh, sudah dilaksanakan sekretariat, dibiayai sekretariat Sekjen. Bapak buat lagi didalam anggaran Bapak, kegiatan yang Bapak biayai, itukan tumpang tindih, akuntansi Pak. Kalau diperiksa sama BPK ini tumpang tindih Pak, harusnya Pak ya saya udah keliling tadi saya bilang beberapa komisi. Bapak buat semacam EO, Bapak lelang kan itu ke pihak ketiga, kemudian serahkan ke anggota, Bapak mau ambil itu dari 100 juta, 200 juta diambil separuhnya, separuhnya lagi serahkan EO-nya anggota itu *clear* Pak. Bapak tidak manipulasi catatan, inikan Bapak manipulasi sama anggota di bawah, Bapak tulis-tulis itu pengadaan ini, pengadaan itu, anggota dikasih 1,7 juta, bicara, anggarannya 300 juta.

Itu namanya dugaan saya manipulasi dan korupsi Pak, itu nggak *clear*. Baiknya Bapak tender-kan ke EO, Bapak ciptakan EO Bapak, kemudian dengan 100 juta Bapak beri kami 80, silakan kami mau alokasikan ke anggota berapa. Kami buat LPJ-nya, pertanggungjawaban, kan itu yang benar Pak.

Kalau saya pernah ngalami di 4 komisi, bukan seperti ini Pak, seperti ini nanti Bapak bentar lagi dikejar-kejar ini kalau ada yang lapor, misalnya saya jahat, saya yang lapor itu Pak Handoko itu main itu sama deputinya, dia sama kabag-kabagnya buat catatan pengadaan-pengadaan, anggota cuma dibayar 1,7 supaya bicara, hotel-hotel dia yang *nyetting*, makanan dia *nyeting*. Bapak itu indikasi korupsi kalau saya duga *gitu*, *mark-up* Bapak itu.

Jadi *nggak* pas ini Pak ya, saya ngomong saya ngalami ya Pak ya, ini pengalaman saya, bukan saya ngajari Bapak. Deputi-deputi Bapak, kabag semua di situ itu sekarang Bapak dengarkan, Bapak boleh studi kelayakan sama komisi lain, sama mitra kementerian lain.

OJK ya saya ingatkan Bapak, OJK yang anggarannya 3 triliun dia berikan dalam bentuk kegiatan ke-EO-nya ada anggota Pak, bukan seperti Bapak ini buat-buat, ayo pergi anggota dikasih tiket, kamu ngomong 1,7 juta itu anak kecil Pak, uang receh.

Salah ini Pak Handoko, Bapak terlalu banyak mau makan sendiri *nih*, ini Bapak kena nanti kalau ada yang jahat kami, ya, kami dorong-dorong, kami demo Bapak di depan KPK, Bapak masuk itu. Rezim ini *oke*-lah Bapak bertahan, rezim ke depan belum tentu Pak. Itu saya ingatkan Pak.

Kemudian yang terakhir, ini ada 1.500 pegawainya menghabiskan 4 triliun Pak. Bagaimana itu Pak 1.500, 4 triliun.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

15.000



**F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP.):**

Maaf 15.000 orang pegawainya begitu banyak menyedot 4 triliun, Bapak fungsikan sebagai apa? Saya heran ini Pak segini banyak. Bapak sebar *nggak*, Bapak *serak* ke Pemda, ke kantor gubernur, ke kementerian, ada *nggak* alokasi seperti itu atau Bapak kumpulkan di Jakarta semua.

Ini *nggak* tepat Pak, Bapak ini kayaknya belum banyak melihat-lihat ke luar negeri ini, fungsinya apa, difungsikan Pak, jangan ntar jadi tukang nyedot anggaran negara aja pak *gitu*. *Gitu loh* Pak Handoko, saya ngomong apa adanya pahit-pahit, Bapak *nggak* senang terserah, yang penting saya ngomong apa adanya demi kebaikan kita dan Bapak, paham kan Pak.

Terima kasih Pimpinan, saya kembalikan.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi, *clarification* Pak Ketua 1 menit aja soal halaman 8 ini.

**KETUA RAPAT:**

Iya silakan Pak.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Ini kesalahan yang sangat patal ini oleh Kepala BRIN, halaman 8 untuk setiap Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dialokasikan sejumlah 25 kegiatan. Tidak ada kegiatan untuk Anggota dan Pimpinan, Pak Kepala BRIN, itu adalah kegiatan ke masyarakat yaitu masyarakat bertanya BRIN menjawab.

Di mana BRIN yang telah melakukan riset, contohnya bagaimana *mem-packing* hasil produksi atau makanan yang, yang tahan lama, yang efektif itu yang sudah dilakukan penelitian oleh BRIN. Inilah dijelaskan terhadap masyarakat di daerah pemilihan yang 200 orang itu, itu untuk kedatangan dari desa-desa, kecamatan ini BRIN memang memberikan transpor ke yang hadir itu 150.000 per orang.

Kalau DPR RI memberikan arahan, itu juga tidak minta ada honorinya 1,5 juta, itu kita *nggak* minta, itu kita kembalikan lagi kepada tim yang di daerah itu. Jadi tidak bukan, bukan untuk anggota dan pimpinan, itu untuk masyarakat di daerah pemilihan.



Jadi bahwa BRIN telah melakukan penelitian untuk teknologi-teknologi yang aplikatif, yang bisa diterapkan di daerah, tepat guna lah ya, tepat guna. Itulah yang dijelaskan kepada masyarakat dan itu masyarakat sebagian yang mendengarkan bisa mempraktekkan, *loh kok* malah disebut untuk setiap pimpinan dan anggota.

Ini gimana cara bahasanya ini, itu kan untuk masyarakat di daerah, kalau mau ditambah daerah pemilihan silakan, tapi itu di daerah karena anggota diminta hadir karena itu di daerah pemilihan anggota atau pimpinan, *kok* malah disebut begini ini bahasanya.

Ini aduh Pak Kepala BRIN ini bahaya ini bikin begini, makanya memang bagus di audit karena saya lihat baca di sini 200-300 juta setiap kegiatan itu. Padahal saya cek ke hotel tempat acara itu cuman 85.000 konsumsinya per orang, udah termasuk tempatnya, tempatnya taruhlah 100.000 kali 200 orang kan, 20 juta, amplopnya 150.000 per orang kali 200 orang 30 juta, hanya 50 juta, anggarannya 300 juta.

Administratifnya kalau mau habis untuk timnya BRIN 50 juta misalnya karena ada yang datang berkelompok, jadi 100 juta, 200 juta ke mana? *Nah* ini memang makanya perlu di audit khusus karena Pak Kepala udah salah ini *nih* membuat seperti ini *nih*.

Kita *nggak* ada urusan kita ke rakyat aja itu, kita hanya menghadiri bahwa kita senang rakyat di daerah pemilihan kita diberikan pengetahuan praktis teknologi tepat guna oleh peneliti BRIN yang hadir dan itu bermanfaat untuk rakyat, tapi anggaran ini terlalu besar 300 juta, sesudah kita cek di lapangan paling tinggi keluar 100 juta, 200 juta ke mana? Itu yang perlu di audit.

Itu aja Pak Ketua, jadi sebaiknya diklarifikasi ini.

Terima kasih Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Luar biasa Pak Ramson ini.

Bu Roro tadi sudah, belum, sekarang Bu Roro dulu, Bu Ratna baru Pak Riko. Iya Bu Roro.

#### **F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):**

Siap, terima kasih Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang saya hormati di sini Pak Ketua, Pimpinan Komisi VII, seluruh Anggota Komisi VII dan hadir di depan kami Ketua, Kepala BRIN dan seluruh jajaran.



Saya hanya ingin mengingatkan kembali berkaitan mengenai kalau kita kembali lagi ya ke Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-undang MD3. Di mana tertera bahwasanya “Anggota DPR RI berkewajiban”, khusus di Pasal 81 huruf i “Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala”.

Lalu huruf j, “Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”.

Dan huruf k, “Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”.

Kami melihat bahwasanya program MBBM (Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab) merupakan salah satu program yang sangat luar biasa. Di mana di situ dilakukan berbagai macam pelatihan dan menjawab banyak sekali persoalan yang ada di lapangan di daerah dan kami sebagai wakil rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi itu dan ternyata BRIN menjawabnya.

Bahwasanya ini ada sebuah program untuk masyarakat, di mana di dalamnya ada beberapa pelatihan, di antaranya yaitu misalnya ya budidaya ikan air tawar, termasuk ikan lele misalnya, lalu kemudian ada juga edukasi *literasi* informasi di era digital yang sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat.

Apalagi kita sekarang juga ingin mendorong *you know 4.0 gitu* ya, industri 4.0 dan lain sebagainya, hingga proses pengolahan tepung pisang dan lain sebagainya yang pada dasarnya sangat amat memberdayakan masyarakat di daerah, karena dari situ kita bisa menggali potensi yang ada di daerah bagaimana masyarakat bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dan ini Anggota DPR semuanya yang turun di daerah pemilihannya masing-masing melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya masing-masing. Dan kami melihat ini ada nilai tambah yang sangat amat luar biasa, kerjasama yang menurut saya sangat bagus antara Komisi VII melakukan tugas Tupoksinya sendiri bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kita kembali lagi tadi salah satu rekan saya sudah menyampaikan berkaitan mengenai realisasi anggaran, bahwasanya MBBM ini hanya salah satu program yang fokus dan langsung menyentuh masyarakat. Ada berbagai macam program lainnya, di mana usulan program kemasyarakatan tersebut untuk tahun anggaran 2022 totalnya 800,8 miliar.

Realisasi *including* ya program Barista *gitu*, salah satu program juga selain dari MBBM realisasinya mencakup 74,5 miliar. Oleh karena itu kita ingin mempertanyakan justru dalam hal ini, bahwasanya dari anggaran yang sudah dialokasikan dengan anggaran yang telah terealisasi ada *gap* di situ.



*Nah* oleh karena itu saya ingin menanyakan kembali anggaran itu diperuntukkan untuk apa? Kalau misalnya kita ingin berbicara mengenai lebih detail lagi, terkhusus untuk wilayah Gresik dan Lamongan daerah pemilihan saya. Saya telah dikomunikasikan bahwasanya untuk setiap program yang tadi sudah keluar ya nominalnya adalah 300 juta, pelaksanaan di setiap titik.

Saya diinformasikan bahwasanya hanya diperuntukkan untuk 100 orang, sedangkan realisasi di lapangan untuk teman-teman lainnya dan memang selayaknya seharusnya dilakukan adalah untuk 200 orang. Setelah saya hitung-hitung karena program ini berjalan 18, di 18 titik, saya melakukan kalkulasi yang cukup simpel sebetulnya dan ada sebuah kerugian sebesar 270 juta yang seharusnya kita berikan ke masyarakat.

Ini uang hak masyarakat yang akhirnya tidak tersalurkan dengan baik dan tidak dikomunikasikan kepada saya. Ini satu, satu contoh saja ya dan teman-teman, teman-teman lainnya mempunyai ceritanya masing-masing berkaitan mengenai pelaksanaan daripada program MBBM ini.

Yang tadinya kita melihat bahwa banyak sekali nilai positif *gitu* ya untuk masyarakat, kita melihat mempunyai potensi untuk memberdayakan rakyat, untuk meningkatkan apa pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerintah hadir untuk melakukan itu, tapi banyak sekali *miss* yang terjadi di lapangan.

*Nah* maka yang terakhir saya ingin menanyakan kepada BRIN dan ini bukan hanya kepada kepala tapi seluruh yang ada di sini, mengenai beberapa program lainnya yang selama ini stagnan juga *gitu*. Misalnya ada program strategis nasional, yang infonya selama ini ada beberapa diantaranya yang kurang optimal dan tidak berjalan sesuai rencana.

Salah satunya berkaitan mengenai, *nih* saya akan bacakan “pelaksanaan paket pengadaan *primata change and HP* fasilitas ABSL 3”, itu yang tidak sesuai ketentuan. Lalu kemudian juga mengenai pengembangan *Drone Male* ya atau Male Kombatan yang juga tidak berjalan. Lalu kemudian pengembangan industri garam yang selama ini juga cukup stagnan dan sebetulnya telah dianggarkan dan tidak terealisasikan anggaran itu.

Sistem deteksi tsunami yang di mana belakangan ini kita tahu bahwa kita mengalami bencana alam di beberapa titik, gempa bumi dan lain sebagainya. Di mana sistem deteksi tsunami ini sangat amat dibutuhkan untuk agar kita dapat mensosialisasikan kepada publik bahwa ada beberapa titik yang pada dasarnya tidak aman dan apa selanjutnya yang harus dilakukan.

Dan program strategis nasional ini ketika tidak dijalankan dengan baik tentunya akan menghasilkan kerugian negara yang cukup besar, ini hanya sebagian kali ya mungkin banyak sekali penelitian lainnya dan saya merasa berdosa, jujur kalau saya tidak mengutarakannya karena moral saya itu lagi perang *gitu* ibaratnya.

Saya tahu sesuatu tapi apakah butuh saya keluarkan di sini dan saya merasa sudah waktunya kita semua mengetahui persoalan dan permasalahan



yang selama ini dialami, baik di internal BRIN maupun juga pelaksanaannya di lapangan.

Saya dalam posisi, bukan berarti gimana ya, intinya kan kalau Komisi VII dari dulu Pak Ketua kita ini selalu menyampaikan, kita ingin menjadi *problem solver*. Apapun permasalahan yang ada di lapangan, apapun permasalahan kelembagaan, kita ingin bagaimana caranya hadir untuk bisa memperjuangkan bersama-sama.

*Nah* oleh karena itu kami dari Komisi VII, mohon, memohon sekali coba kita kembali lagi ke moralitas kita masing-masing *gitu* ya. Bahwasanya mohon kita betul-betul bagaimana kita apa ya memperjuangkan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan lagi kepentingan pribadi dan lain sebagainya dan tolong saya mohon jangan sampai persepsi DPR itu dijerumuskan lagi *gitu loh*.

Dalam arti kata kita sudah, persepsi publik di saat kita semua dilantik saja sudah jelek padahal kita belum melakukan apa-apa sudah dicap sebagai orang yang ibaratnya pengkhianat dan lain sebagainya *gitu*. Padahal kita ketika duduk di sini betul-betul bekerja dengan hati itu *sih* dan saya mungkin baru pertama kali ini ya bisa melampiaskan semuanya yang ada di hati saya karena saya capek. Saya capek sekali harus gimana caranya ngasih tahu *gitu loh* ke publik, bahwa kita itu tidak seperti itu *gitu*.

Kita berjuang *kok* untuk masyarakat, kita turun *kok* ke lapangan, kita mendengarkan kok aspirasi mereka dan kita bekerja dengan benar *gitu*. Jadi kalau misalnya ada *miss-conception* atau *miss-understanding* seperti ini di publik, citra DPR akan semakin menurun, yang tadi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga saja sudah di bawah 50% mungkin akan turun lagi *gitu*.

*Nah*, saya mohon sekali kerjasamanya lah karena pada dasarnya kan kita kepingin ya itu tadi Pak Ketua selalu menyampaikan *problem solver*, ayolah kita bekerja sama. Siapa *sih* kita melakukan ini untuk siapa *sih*, selain untuk ibadah ya kita memikirkan bagaimana rakyat, bagaimana bangsa.

Tugas kita di sini adalah untuk bekerja sama agar negara Indonesia ini bisa semakin maju, itu. Jadi saya mohon sekali kita semua kembali lagi, kita mengingat kembali kenapa kita ada di sini, amanah, semuanya adalah bentuk dari amanah yang diberikan oleh Tuhan.

Jadi saya mohon sekali kita merenung dan betul-betul berpikir bagaimana dari sini kita bisa progres lagi ya melakukan berbagai macam progres dan kita bisa berkontribusi semaksimal mungkin untuk bangsa.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**



*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Selanjutnya Ibu Ratna.

**F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi VII,  
Yang kami hormati Pimpinan serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII,  
Yang saya banggakan Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional  
beserta segenap jajarannya.

Bisa lihat saya dulu Pak, biarkan anak buah Bapak yang mencatat  
masukan dan pertanyaan dari saya untuk Bapak, bisa? Bisa ya, terima kasih.  
Jadi Pak Handoko yang sangat kami banggakan, pasti Bapak juga ingat waktu  
Bapak masih menjabat sebagai Kepala LIPI.

Bapak bertemu dengan kami di ruangan ini, bagaimana kita  
menyamakan persepsi untuk akhirnya bisa melahirkan Badan Riset dan Inovasi  
Nasional yang Perpres-nya saat itu *nggak* turun-turun, kami galau  
membrosamai Bapak dan akhirnya pada tanggal 21 kalau *nggak* salah,  
September di tahun 2021 lahirlah sebuah lembaga super *power* yang sangat  
ditunggu-tunggu oleh semua peneliti yang ada di Indonesia dengan nama  
Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini terlibat dan masih ingat,  
BRIN lahir atas dasar Undang-Undang Sisnas Iptek Nomor 11 Tahun 2019.  
BRIN lahir saat itu ditujukan untuk mengkonsolidir semua lembaga riset yang  
selama ini kita anggap belum kuat, belum cukup mampu, belum cukup untuk  
mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia maju, masih ingat ya Pak, Bapak-Ibu  
semuanya yang saya banggakan di depan saya ini juga harusnya masih ingat.  
Setelah BRIN lahir ternyata kondisinya berbeda, banyak sekali peneliti-peneliti  
yang menangis-nangis menyampaikan aspirasi mereka kepada kami.

Dengan melegitimasi dasar dari Pak Handoko yang kami banggakan,  
butuh waktu untuk transisi dari segi ESDM, dari segi organisasi, kita membantu  
Bapak untuk menenangkan orang-orang hebat yang sudah disekolahkan  
negara dengan biaya berjuta-juta sampai ke luar negeri, sampai ke mana-mana  
untuk menenangkan mereka, Pak.

Saya, semua yang ada di Komisi VII ini percaya sama Bapak, tapi  
mungkin Bapak sudah tidak ingat pada saat itu saya cuman menyampaikan  
kepada Pak Handoko bahwa "Tolong, tolong Bapak bisa memanusiakan  
manusia".

Yang kedua Pak, setelah BRIN lahir banyak program, ada Barista, ada  
*start-up*, ada lain-lain tapi Bapak juga harus ingat kalau 2021 itu saya laporkan



juga Ketua, *start-up* itu yang 30% belum cair sampai sekarang. *Nah* itu pertanggungjawaban kita kepada UMKM yang udah terlanjur mengadakan barang, udah terlanjur membayar sewa dan lain-lain ini mau dikemanakan.

Mereka cuman dikasih gula-gula, ayo sekarang mau cair tolong kuitansinya diperbarui sesuai tanggal ini, mereka beli materai sampai habis 1,5 juta, 2,5 juta dengan harapan itu bisa cair ternyata *nggak* juga Pak, 2021, 2022, ini udah tahun 2023.

Yang berikutnya terkait Barista, sistem pendaftaran *online*, *fix* tidak boleh di nego. Teman-teman kami yang ada di luar pulau nangis Pak, konstituen mereka *nggak* bisa mengakses, boro-boro internet, listrik aja biar *pet loh*. Kami menyampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami banggakan ini supaya bagaimana caranya ini bisa diolah, biar aksesnya mudah.

Ternyata bukan aksesnya yang dipermudah, tapi bentuknya yang dirubah, pusing lagi kami. Ini sebenarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang luar biasa ini yang akademisnya sudah melebihi kami mungkin, kok *yo* *nggak* bisa *yo* menyiapkan program yang mudah diakses *gitu* aja *loh*, susahnya di mana *gitu loh*, yang inklusif Pak yang dari Sabang sampai Merauke itu semuanya bisa dapat dalam rangka memeratakan pendidikan kita sesuai keinginan dari awal pembentukan BRIN. Indonesia maju dengan inovasi, dengan teknologi *bla, bla*, ini *loh* sebenarnya cuman *tagline*, apa mau diraih *sih*.

Yang terakhir Pak, yang terakhir, kejadian hari ini tadi Pak Wakil Ketua Komisi sudah menyampaikan banyak, teman-teman juga sudah menyampaikan banyak. Kami *nggak* ingin Pak, dihormati kami *nggak* ingin, tapi sebisa mungkin kami akan berusaha untuk menghormati semua mitra-mitra kami.

Bahkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan mereka *nggak* masukin BRIN, kita ancam Pak. BRIN harus masuk, mereka harus terlibat karena ini penting, BRIN ini lembaga penting. Cuman kalau ternyata fakta hari ini adalah sebagai dari apa yang bisa Bapak lakukan untuk membalas penghormatan dari kami, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Itu saja Ketua, terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri.

*Wallahulmuwafiq ila aqwamitthoriq,  
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Iya segala sesuatu disampaikan dengan gamblang Bu Ratna.



Dipersilakan Bung Rico, saya kira ini habis itu Ibu.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Mempersingkat waktu, Pak Kepala BRIN saya izin bertanya satu saja, mohon izin interaktif Pimpinan, Pimpinan izin interaktif. Pak Kepala BRIN, saya izin menanyakan apakah tadi kita bahas uang yang 800 miliar yang terealisasi hanya anggaplah 100 miliar. Apakah 800 miliar itu cair atau memang sama sekali *nggak* ada itu 700 miliarnya, cuma hanya 100 miliar.

Mohon interaktif Pimpinan, atau mungkin ada sebagian aja yang cair.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

Iya mohon izin Pak Pimpinan untuk merespon.

Jadi sebab di sejak awal di bulan yang pada saat itu ya Pak, yang di hotel itu konsinyering itu, itu sudah saya sampaikan. Pada saat itu RKAKL itu sudah jadi yang dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan itu, sehingga kita itu tidak bisa memindahkan sebesar 800 miliar itu, yang kami lakukan adalah menyisir yang memang bisa kita pakai. Itu sebabnya kami tidak bisa memakai misalnya semacam EO *gitu* karena kami harus misalnya untuk perjalanan, itu kami harus ambil dari operasional, untuk ini dari seperti itu.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, izin Pak yang saya tanyakan, apakah dari program yang kita bersama-sama sepakati, kita sama-sama ketok 800 miliar itu untuk a, b, c, d, e dan seterusnya itu apakah uangnya cair semuanya. Saya *nggak* bicara satu dari mana, kenapa disisir dan lain sebagainya, apakah karena program itu kan kita sudah ketok bersama ya. Kita ketok bersama jadi kita *nggak* bicara lagi dari sana, dari sini, dari sana, kita ketok bersama. Apakah uang itu cair, ada uangnya?

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

Jadi semua yang kami belanjakan itu basisnya adalah *at cost*, ya jadi bukan *lump sum*. Jadi meskipun di tabel itu kan biasanya dituliskan 1 MBBM misalnya 300 juta, tapi itu kan sebenarnya rata-rata pada saat itu karena kita sendiri tidak tahu itu akan habis berapa tergantung *add cost*. Jadi kalau di situ



ada 100 orang, kita bayar 100 orang, kalau 200 orang kita harus bayar 200 orang sesuai SDM dari Kementerian Keuangan, ya.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, berarti uangnya ada tergantung dari besaran dari masing-masing wilayah di mana itu *ter-spending gitu* ya.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

Yang kami kejar adalah volume pelaksanaan.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

*Oke.*

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

Jadi bukan gelondongannya karena kami tidak bisa melakukan gelondongan itu.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, *nah* apabila uang itu ada terus selanjutnya kemudian didalam pelaksanaan yang sudah disepakati a, b, c, d, e dan lain sebagainya itu tadi terus memang tidak terlaksana. Apakah BRIN harus kembali berkonsultasi rapat dengan DPR terkait dengan hal tersebut atau BRIN boleh mempergunakan atau semau-maunya terserahnya sendiri, pendapatnya Bapak.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

Jadi anggaran itu sebenarnya ada di anggaran program yang sudah ditetapkan Bappenas. *Nah*, anggaran program Bappenas itulah yang kami alokasikan sesuai substansi programnya, itu sebabnya pada saat awal saya sampaikan yang kami bisa lakukan adalah memakai program reguler *gitu*. Jadi yang 7 itu kan semua program reguler yang memang dibuka untuk semua orang juga.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

*Oke* baik, berarti pemahaman saya Bapak punya 2 neraca, Bapak punya 2 buku. Buku yang satu untuk ke sana, buku yang satu untuk ke DPR.



**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

*Ooh* tidak begitu Bapak.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

*Nggak*, yang dari Bapak jelaskan seperti itu karena begini, kan kita di sini membahas yang program itu, Bapak iya kan bersama semua tim.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

Yang volume Bapak.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Iya yang volumenya, *oke* kita bicara volume. Volume dikalikan angka jadinya angka juga ya Pak ya dan itu kita sepakati di sini, kita sepakati. Kalau Bapak jawabnya di sini lain, terus yang kita pakai adalah di sana berarti Bapak punya 2 buku.

Yang buku yang ini buat di sini, buku yang di sana buat di sana, itu yang saya tangkap, Pak. Saya kan bukan profesor Pak, bukan juga doktor mungkin sekolahnya juga masih dibawah Bapak. Tapi yang ada di pemahaman saya seperti itu, Pak kita sepakati di DPR A, di sana Bapak bilang kita pakai yang di sana yang B, berarti Bapak punya dua buku, di sana lain, di sini lain.

Sehingga inilah *chaos*-nya Pak jadi, nah saya sepakat berarti dengan keterangan Bapak bahwa ini harus diinvestigasi mungkin Pimpinan. Ingat *loh* Pak, kita bukan per fraksi di sini, kami ini diserang komisinya, bukan PDIP, bukan Nasdem, bukan Golkar, bukan PKB tapi Komisi VII. Komisi VII itu terdiri dari semua partai yang ada, fraksinya.

Yang Bapak lagi bikin berita di sana Bapak lagi *powerful* betul untuk menyerang semua partai, termasuk PDIP karena di sini juga ada pimpinannya PDIP, ada anggota juga PDIP, Bapak lagi serang semuanya. Saya bukan membela itu Pak, bukan membela a, b tapi yang Bapak lagi serang *nih* komisi, dengan bahasa-bahasa seperti itu dan termasuk yang tadi ada di halaman 8 ini. Bahwa dipakai oleh anggota DPR itu uang, bahasanya ini pakai anggota DPR *loh* Pak, bukan program rakyat.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

*Oke* Pak Rico saya kira maknanya ditangkap dari yang disampaikan.

Sebentar Pak gandung, setelah Pak Rusda dulu habis ini Pak Gandung, Bu Diah, maaf Bu Diah, Pak Rusda baru Pak Gandung.



**F-DEMOKRAT (RUSDA MAHMUD):**

Ibu Diah atau saya.

**KETUA RAPAT:**

Bu Diah.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati,  
Pak Kepala BRIN beserta jajaran.

Sudah sangat banyak disampaikan oleh teman-teman, saya ingin menyampaikan begini, Pak. Seseorang itu terlebih lagi katanya, laki-laki itu yang dipegang ucapannya, kehormatannya ada pada sejauhmana dia benar dalam ucapannya.

Jadi dalam proses-proses pembahasan antara BRIN dan Komisi VII kami dapatkan bahwa Bapak ucapkan kepada kami dalam bentuk kemudian kita sepakati bersama di rancangan-rancangan program kita, pada kenyataannya menjadi sesuatu yang Bapak juga tidak serius di dalam mewujudkannya.

Tidak serius itu memang banyak faktor Pak, bisa jadi tidak mampu, bisa jadi memang dari awal *nggak* bisa, tapi Bapak kemudian tidak berani menolak atau apapun juga. Tapi sebagai pimpinan semua tanggung jawab itu ada pada Bapak, kesalahan di staf, di manapun semua tanggung jawab ada pada Bapak.

Dan ada satu hal Pak, ada yang mungkin tidak ada sekolahannya, gelar setinggi apapun mungkin bisa diraih oleh banyak orang, tapi banyak hal terkait dengan adab, budi pekerti, empati, simpati boleh jadi *nggak* ada sekolahannya, Pak.

Kita belajar dari kehidupan bagaimana berempati, kami di sini berhadapan dengan masyarakat, sepele Pak masyarakat nagih mana kausnya dari BRIN *nggak* ada, sepele Pak, kaos. Tapi pada kenyataannya termasuk dia yang gagal dilaksanakan oleh BRIN sekedar memberikan kaos yang dijanjikan saja sekian bulan ribuan masyarakat, lebih mungkin dari 10.000 dijanjikan dan sampai hari ini tidak ada, dianggap ya sudah, sudah lewat tahun anggaran, hilang, tidak bisa dianggarkan lagi.

Kami memahami soal anggaran dan kita bisa menerima anggarannya sudah tidak ada lagi, tetapi secara kata-kata Pak, kami ini di lapangan dianggap



sebagai pembohong yang kesalahannya bukan ada pada kami. Ini Pak dampak besar kata-kata yang tidak bisa diwujudkan tanpa alasan-alasan yang jelas.

Oleh sebab itu menurut saya terlebih lagi untuk persyaratan menjadi seorang pemimpin hal-hal seperti itu sangat harus dipertimbangkan, kalau orang tidak punya rasa empati, orang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan berbagai macam persoalan, berat untuk menjadi seorang pemimpin Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jelas juga yang disampaikan Ibu Diah.

Selanjutnya Pak Rusda, setelah ini Pak Gandung dan saya kira sudah cukup ya.

**F-DEMOKRAT (RUSDA MAHMUD):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII,  
Yang saya hormati Kepala BRIN beserta seluruh jajarannya.

Jadi usul Pimpinan, kalau menurut saya *ndak* usahlah kita membahas program-program ini, tinggal langsung saja pertanggungjawabkan 800 juta, *eh* 800 miliar. Kemudian kesimpulan kita bahwa hampir semua keluhan teman-teman itu bahwa Kepala BRIN, kita usulkan untuk diganti.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Gadung dipersilakan.

**F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya tidak menerima apa yang disampaikan melalui jawaban langsung tadi oleh Kepala BRIN, itu bohong semua, bohong dengan kenyataan. Jadi itu pembohongan, jadi apa yang disampaikan tuh tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.



Untuk itu saya tetap mempunyai pendapat ganti Kepala BRIN dan undang investigasi apa, keuangan. Jadi ini perlu dan penting, dan tidak hanya 800 miliar banyak program-program yang tidak berbasis kinerja. Ada program tidak mempunyai *output*, tidak mempunyai *outcome*, tidak ada *benefit*, banyak sekali. Kalau itu terjadi banyak sekali, maka di sini BRIN itu sarang korupsi, perlu kita bersihkan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Iya, terima kasih Pak Gandung.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Saya kira cukup sudah apa yang disampaikan dari berbagai anggota yang terhormat dan juga tadi diawali oleh Pak Maman Abdurrahman selaku Anggota sekaligus Pimpinan Komisi VII telah menyampaikan dengan lugas.

Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, saya kira saya Pimpinan Rapat mau mengambil keputusan untuk segera saja kita menyimpulkan rapat ini begitu, setuju ya.

Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Senin 30 Januari 2023.

1. Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu, terkait penggunaan anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022 oleh BPK Republik Indonesia.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Republik Indonesia, mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Saya kira demikianlah 2 kesimpulan ini yang telah kami apa, dari hasil akan disampaikan oleh segenap Anggota Komisi VII yang terhormat, baik yang hadir secara fisik langsung di forum ini maupun melalui forum *virtual*.

Bapak-Ibu sekalian.

Untuk sebelum kita tutup rapat ini saya memberi kesempatan sekali lagi kepada Kepala BRIN untuk menyampaikan semacam *closing statement*.

Dipersilakan yang terhormat.

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (LAKSANA TRI HANDOKO):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Jadi kami akan segera juga melakukan investigasi di internal kami terkait hal-hal yang sudah jadi masukan yang tadi disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian.

Demikian, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BRIN ditutup.

*Wabillahittaufig wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.37 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti  
NIP. 196505061994032002



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive-like mark.